



DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemberdayaan Generasi Muda Terhadap Pencegahan Korupsi

Bramantio Prastyono¹, Vinola Herawaty²

¹Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia, bprastyono230788@gmail.com

²Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia, vinola.herawati@trisakti.ac.id

Corresponding Author: bprastyono230788@gmail.com¹

Abstract: *The main objective of this study is to analyze the extent to which digital media can function as an effective educational tool in encouraging the active participation of the younger generation in preventing corruption. The method used in this study is a mixed approach, namely quantitative and qualitative. The quantitative method uses SPSS 25 for validity, reliability, and hypothesis testing, while the qualitative method is carried out by thematic analysis of interviews conducted to identify key themes and response categories. Data were collected through questionnaires distributed to 139 respondents, consisting of students and related stakeholders. The results of the study indicate that the use of digital media has the potential to increase participants' awareness and understanding of integrity values. However, in terms of behavioral change, there are still major challenges such as low participation, limited access to technology, and cultural barriers.*

Keyword: *Digital Media, Integrity, Character Education, Anti-Corruption Behavior.*

Abstrak: Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana media digital dapat berfungsi sebagai alat pendidikan yang efektif dalam mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam mencegah korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan SPSS 25 untuk uji validitas, reliabilitas, dan pengujian hipotesis, sedangkan metode kualitatif dilakukan dengan analisis tematik dari wawancara yang dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan kategori respons. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 139 responden, yang terdiri dari mahasiswa dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media digital berpotensi meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta mengenai nilai-nilai integritas. Namun, dalam hal perubahan perilaku, masih terdapat tantangan besar seperti rendahnya partisipasi, keterbatasan akses teknologi, dan hambatan budaya.

Kata Kunci: Media Digital, Integritas, Pendidikan Karakter, Perilaku Anti Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah struktural yang membudaya, mengakar kuat dalam birokrasi dan kehidupan sosial, serta menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga

menghambat pelayanan publik, memperbesar ketimpangan, serta menggerus kepercayaan terhadap institusi negara (Nuruddin et al., 2024; Firmansyah & Syam, 2022). Upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan konvensional seperti penegakan hukum dan edukasi formal masih terbatas efektivitasnya. Pendidikan anti-korupsi di institusi pendidikan kerap bersifat normatif dan minim inovasi, sehingga gagal menanamkan nilai-nilai integritas secara menyeluruh pada peserta didik (Setiawan, 2023).

Dalam konteks ini, digitalisasi muncul sebagai alternatif strategis. Teknologi digital seperti *e-government*, media sosial, hingga platform edukatif *online* terbukti mampu meningkatkan transparansi dan memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan sosial (Sofyani et al., 2020; Mackey & Cuomo, 2020). Namun, meskipun media digital telah dimanfaatkan dalam kampanye antikorupsi, efektivitasnya dalam membentuk sikap dan perilaku antikorupsi secara konkret belum banyak dikaji secara sistematis. Sebagian besar penelitian masih terfokus pada peningkatan kesadaran atau pemahaman, bukan pada perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Pendekatan gamifikasi dalam media digital menawarkan peluang edukatif yang menjanjikan. Dengan menggabungkan elemen permainan ke dalam materi pendidikan, generasi muda dapat terlibat lebih aktif dan emosional dalam pembelajaran antikorupsi. Ini selaras dengan kebutuhan untuk menginternalisasi nilai melalui pendekatan afektif dan psikomotorik, bukan sekadar kognitif. Namun demikian, hingga kini belum tersedia cukup banyak studi berbasis data kuantitatif yang membuktikan hubungan antara interaksi dalam media digital dan perilaku nyata dalam konteks anti-korupsi (Wibowo et al., 2024; Zulqarnain et al., 2022).

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah kesenjangan akses teknologi antara daerah urban dan rural. Rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi dari lingkungan sosial tertentu menjadi hambatan implementatif yang harus diatasi (Taryanto & Prasajo, 2022). Selain itu, masih minimnya model evaluasi pendidikan digital yang mengukur ketiga domain kompetensi—pengetahuan, sikap, dan tindakan—menyebabkan banyak program edukasi berbasis media tidak dapat diukur efektivitasnya secara akurat (Rahman, 2022).

Melihat berbagai persoalan tersebut, sangat diperlukan riset yang tidak hanya mendeskripsikan potensi media digital, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pengaruhnya terhadap perilaku generasi muda dalam konteks pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur, memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model pendidikan antikorupsi berbasis teknologi, serta menghasilkan rekomendasi praktis untuk kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* (metode campuran), yaitu kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif yang dirancang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap efektivitas pendidikan antikorupsi berbasis digital dalam membentuk kesadaran, pemahaman, dan perilaku antikorupsi generasi muda di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan triangulasi data, di mana hasil statistik dari survei diperkuat dengan narasi kontekstual dari wawancara mendalam, guna meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan.

Secara kuantitatif, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner tertutup berbasis skala Likert lima poin kepada 139 responden yang terdiri dari mahasiswa, pelajar tingkat akhir, serta pemangku kepentingan pendidikan antikorupsi. Instrumen kuantitatif dirancang untuk mengukur persepsi, sikap, dan tingkat penerimaan terhadap media digital pembelajaran. Analisis dilakukan menggunakan SPSS versi 27, yang mencakup uji validitas, reliabilitas, uji

normalitas, serta uji hipotesis melalui regresi linier berganda dan/atau ANOVA untuk menguji hubungan antarvariabel dalam kerangka konseptual.

Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pelajar, tenaga pendidik, serta pembuat kebijakan atau pengelola program pendidikan antikorupsi berbasis digital. Tujuan utama pendekatan ini adalah menggali secara mendalam pengalaman, motivasi, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh para informan dalam mengikuti atau mengelola program edukasi tersebut. Data kualitatif dianalisis menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi tema-tema dominan, seperti dinamika keterlibatan, hambatan implementatif, transformasi sikap, serta pandangan terhadap efektivitas media digital dalam membentuk integritas dan nilai moral antikorupsi. Analisis ini memberikan kedalaman interpretasi terhadap hasil survei dan memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual dan reflektif terhadap fenomena yang diteliti.

Populasi penelitian mencakup individu dari berbagai rentang usia—mulai dari di bawah 20 tahun hingga di atas 40 tahun—yang pernah mengikuti program edukasi antikorupsi berbasis platform digital. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive untuk menjamin keterwakilan informan yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan selama periode waktu tertentu melalui kombinasi metode daring dan luring, baik dalam pengisian kuesioner maupun pelaksanaan wawancara. Instrumen penelitian terdiri atas dua komponen utama: (1) kuesioner kuantitatif yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya untuk mengukur variabel persepsi, pemahaman, dan sikap antikorupsi; serta (2) panduan wawancara semi-terstruktur yang fleksibel untuk mengeksplorasi isu-isu substansial secara kontekstual. Penggabungan kedua pendekatan ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai efektivitas media digital dalam membentuk kesadaran dan perilaku antikorupsi generasi muda secara kritis, reflektif, dan beretika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pendidikan anti-korupsi berbasis digital dalam membentuk kesadaran dan perilaku generasi muda Indonesia. Berdasarkan survei terhadap 139 responden berusia 20–40 tahun, pendekatan digital dinilai mampu meningkatkan pemahaman tentang isu korupsi. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses digital dan minimnya interaktivitas materi menjadi hambatan yang perlu diatasi (Ayuningtyas et al., 2022).

Sebanyak 92% responden memahami dampak negatif korupsi terhadap ekonomi dan ketimpangan sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hoseah (2014) yang menyebut korupsi sebagai hambatan serius dalam pembangunan berkelanjutan dan melemahkan etika publik. Walaupun pemahaman tergolong tinggi, hambatan psikologis dan sosial seperti rasa takut atau ketidakberdayaan masih menghalangi tindakan nyata dalam melawan korupsi.

Mayoritas responden (lebih dari 80%) meyakini bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka menilai pendidikan anti-korupsi yang memadukan nilai moral, etika, kepemimpinan, serta media sosial lebih relevan dan efektif. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Ceva & Ferretti (2021) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas lembaga publik dari pengaruh koruptif.

Selain pendekatan individual, aspek sistemik juga perlu diperhatikan. Irlandi (2025) menyoroti pentingnya transparansi politik, terutama dalam pelaporan keuangan partai, untuk mencegah penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam memperkuat efektivitas program anti-korupsi. Ayuningtyas et al. (2022) juga menekankan bahwa distribusi bantuan sosial yang transparan merupakan bentuk nyata dari integritas kebijakan publik.

Hasil Kuesioner Permasalahan Korupsi di Indonesia

Tabel 1. Pertanyaan Kuesioner – Permasalahan Korupsi Di Indonesia

Permasalahan Korupsi di Indonesia:									
No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu segera ditangani.	124	7	1	-	94.7%	5.3%	0.8%	0.0%
2	Korupsi berdampak negatif terhadap pembangunan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.	122	9	1	-	93.1%	6.9%	0.8%	0.0%
3	Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum cukup efektif.	99	28	4	1	75.6%	21.4%	3.1%	0.8%
4	Korupsi merugikan kepentingan masyarakat luas dan menciptakan ketimpangan sosial.	115	17	-	-	87.8%	13.0%	0.0%	0.0%
5	Korupsi di sektor publik dan swasta memiliki dampak yang sama pentingnya.	98	31	2	1	74.8%	23.7%	1.5%	0.8%
6	Korupsi menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	116	16	-	-	88.5%	12.2%	0.0%	0.0%
7	Korupsi dapat mengancam stabilitas politik dan sosial di Indonesia.	110	20	1	1	84.0%	15.3%	0.8%	0.8%
Average Score		112	18	1	0	85.5%	14.0%	1.0%	0.3%

Sumber: Hasil Riset

Berdasarkan **Tabel 1**, sebanyak 85,5% responden menyadari korupsi sebagai masalah serius, sementara 75,6% menilai upaya pemberantasannya belum efektif. Ini sejalan dengan Koeswayo et al. (2024) yang menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap buruknya tata kelola publik berkorelasi dengan rendahnya nilai indeks persepsi korupsi.

Peran Generasi Muda dalam Perubahan Sosial

Tabel 2. Pertanyaan Kuesioner – Peran Generasi Muda Dalam Perubahan Sosial

Peran Generasi Muda dalam Perubahan Sosial:									
No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Generasi muda memiliki peran kunci dalam memerangi korupsi di Indonesia.	87	38	6	1	66.4%	29.0%	4.6%	0.8%
2	Partisipasi aktif generasi muda dapat membawa perubahan sosial positif.	89	41	2	-	67.9%	31.3%	1.5%	0.0%
3	Generasi muda memiliki energi dan kemampuan untuk mendorong reformasi anti-korupsi.	90	37	3	2	68.7%	28.2%	2.3%	1.5%
4	Pendidikan anti-korupsi harus menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan generasi muda.	109	20	1	2	83.2%	15.3%	0.8%	1.5%
5	Generasi muda harus didorong untuk aktif berperan dalam kebijakan publik anti-korupsi.	103	28	1	-	78.6%	21.4%	0.8%	0.0%
6	Pelatihan keterampilan kepemimpinan diperlukan untuk mempersiapkan generasi muda dalam memerangi korupsi.	95	30	6	1	72.5%	22.9%	4.6%	0.8%
7	Kolaborasi antara generasi muda, pemerintah, dan sektor swasta penting untuk mencapai perubahan sosial yang signifikan.	100	28	4	-	76.3%	21.4%	3.1%	0.0%
Average Score		96	32	3	1	73.4%	24.2%	2.5%	0.7%

Sumber: Hasil Riset

Berdasarkan **Tabel 2**, sebanyak 73,4% responden menilai generasi muda penting dalam reformasi anti-korupsi. Hal ini didukung oleh Virgy et al. (2024) dan Ceva & Ferretti (2021) yang menekankan peran aktif generasi muda dalam pengawasan kebijakan dan pentingnya pelatihan kepemimpinan serta pendidikan etika.

Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi

Tabel 3. Pertanyaan Kuesioner – Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi

Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi:									
No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Program pendidikan anti-korupsi harus mengintegrasikan teknologi digital untuk efektivitas yang lebih baik.	83	44	3	2	63.4%	33.6%	2.3%	1.5%
2	Pelatihan praktis dan simulasi kasus korupsi perlu disertakan dalam program edukasi anti-korupsi.	90	38	1	3	68.7%	29.0%	0.8%	2.3%
3	Program edukasi anti-korupsi harus mencakup nilai-nilai moral dan etika secara mendalam.	108	23	1	-	82.4%	17.6%	0.8%	0.0%
4	Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk mengedukasi dan memobilisasi generasi muda melawan korupsi.	95	34	1	2	72.5%	26.0%	0.8%	1.5%
5	Program edukasi anti-korupsi harus disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan generasi muda di Indonesia.	94	34	4	-	71.8%	26.0%	3.1%	0.0%
6	Kemitraan antara sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil penting dalam pengembangan program edukasi anti-korupsi.	99	32	1	-	75.6%	24.4%	0.8%	0.0%
7	Evaluasi reguler terhadap program edukasi anti-korupsi diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan relevansinya.	96	34	2	-	73.3%	26.0%	1.5%	0.0%
Average Score		95	34	2	1	72.5%	26.1%	1.4%	0.8%

Sumber: Hasil Riset

Berdasarkan **Tabel 3**, responden mendukung edukasi anti-korupsi berbasis teknologi dan penanaman nilai etika. Ceva & Ferretti (2021) serta Irlandi (2024) menekankan pentingnya pendidikan etis yang kontekstual dan relevan bagi generasi muda untuk mencegah konflik kepentingan dan korupsi.

Evaluasi Efektivitas Program

Tabel 4. Pertanyaan Kuesioner – Evaluasi Efektivitas Program

Evaluasi Efektivitas Program:

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Program anti-korupsi yang efektif harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.	98	34	-	-	74.8%	26.0%	0.0%	0.0%
2	Evaluasi partisipatif oleh peserta dan pemangku kepentingan penting dalam menilai efektivitas program anti-korupsi.	96	36	-	-	73.3%	27.5%	0.0%	0.0%
3	Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan dan evaluasi program dapat meningkatkan akuntabilitas.	93	36	3	-	71.0%	27.5%	2.3%	0.0%
4	Evaluasi berkelanjutan harus dilakukan untuk menyesuaikan dan memperbaiki program anti-korupsi.	105	27	-	-	80.2%	20.6%	0.0%	0.0%
5	Efektivitas program anti-korupsi seharusnya diukur berdasarkan perubahan perilaku dan sikap terhadap korupsi.	91	40	1	-	69.5%	30.5%	0.8%	0.0%
6	Dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah penting dalam menjamin kesinambungan program anti-korupsi.	103	29	-	-	78.6%	22.1%	0.0%	0.0%
7	Keterlibatan masyarakat sipil dalam evaluasi program anti-korupsi dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.	97	32	3	-	74.0%	24.4%	2.3%	0.0%
Average Score		98	33	1	-	74.5%	25.5%	0.8%	0.0%

Sumber: Hasil Riset

Berdasarkan Tabel 4, sebanyak 74,8% responden menilai indikator kinerja yang jelas penting untuk menilai efektivitas program. Evaluasi rutin, pelibatan komunitas, dan teknologi informasi dianggap krusial untuk meningkatkan akuntabilitas, sejalan dengan pandangan Ayuningtyas et al. (2022) dan Koeswayo et al. (2024).

Tantangan Dalam Implementasi

Tabel 5. Pertanyaan Kuesioner –Tantangan Dalam Implementasi

Tantangan dalam Implementasi:

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Kurangnya sumber daya dan dana merupakan hambatan utama dalam implementasi program anti-korupsi.	51	34	33	14	38.9%	26.0%	25.2%	10.7%
2	Resistensi dari kelompok kepentingan yang terlibat dalam praktik korupsi sering kali menghambat implementasi program anti-korupsi.	94	35	3	-	71.8%	26.7%	2.3%	0.0%
3	Masalah koordinasi antarinstansi dan kurangnya sinergi antara sektor publik dan swasta menjadi tantangan dalam implementasi program anti-korupsi.	81	45	6	-	61.8%	34.4%	4.6%	0.0%
4	Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dapat mengganggu kesinambungan program anti-korupsi.	95	36	1	-	72.5%	27.5%	0.8%	0.0%
5	Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah merupakan hambatan dalam mengimplementasikan program anti-korupsi.	91	34	7	-	69.5%	26.0%	5.3%	0.0%
6	Ketidakmampuan dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif dalam implementasi program anti-korupsi.	68	42	20	2	51.9%	32.1%	15.3%	1.5%
7	Perlu nya perbaikan regulasi dan kebijakan yang mendukung untuk memudahkan implementasi program anti-korupsi.	102	29	1	-	77.9%	22.1%	0.8%	0.0%
Average Score		83	36	10	2	63.5%	27.8%	7.7%	1.7%

Sumber: Hasil Riset

Berdasarkan Tabel 5, Tantangan utama program anti-korupsi adalah minimnya sumber daya, resistensi kelompok kepentingan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Hoseah (2014) dan Virgy et al. (2024) menekankan pentingnya dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan metode Principal Component Analysis (PCA) untuk memastikan instrumen mengukur variabel secara akurat. Item dinyatakan valid jika nilai loading faktornya > 0,5. Hasil analisis menunjukkan tiap variabel membentuk satu komponen utama, menandakan bahwa seluruh item konsisten mengukur satu dimensi (unidimensional). Berikut hasil uji tiap variabel:

a) Permasalahan Korupsi di Indonesia

Hasil uji validitas untuk "Permasalahan Korupsi di Indonesia" menunjukkan semua item memiliki nilai *loading factor* > 0,5, dengan nilai tertinggi 0,852 (MASALAH2) dan terendah 0,604 (MASALAH7). Analisis PCA menghasilkan satu komponen utama, menandakan semua item **Valid** mengukur variabel yang sama. Lihat Tabel 6 untuk detailnya.

Tabel 6. Matriks Komponen - Permasalahan Korupsi di Indonesia

<i>Component Matrix^a</i>	
	Component
	1
MASALAH1	.784

MASALAH2	.852
MASALAH4	.728
MASALAH5	.625
MASALAH6	.743
MASALAH7	.604

Extraction Method: Principal Component Analysis

a. 1 components extracted.

Sumber: Hasil Riset SPSS 25

b) Peran Generasi Muda dalam Perubahan Sosial

Pada variabel "**Peran Generasi Muda dalam Perubahan Sosial**", hasil uji validitas menunjukkan semua item memiliki nilai *loading factor* > 0,5, antara 0,575 dan 0,795. Nilai tertinggi pada item **PERAN3** dan terendah pada **PERAN1**. Semua item dimuat dalam satu komponen utama, menandakan **Valid**. Lihat Tabel 7 untuk detailnya.

Tabel 7. Matriks Komponen - Peran Generasi Muda dalam Perubahan Sosial

Component Matrix^a

	Component
	1
PERAN1	.575
PERAN2	.691
PERAN3	.795
PERAN4	.644
PERAN5	.786
PERAN6	.780
PERAN7	.735

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Sumber: Hasil Riset SPSS 25

c) Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi

Uji validitas pada variabel "**Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi**" menunjukkan hasil sangat baik, dengan nilai *loading factor* > 0,5. Item **PENGEMBANGAN7** memiliki kontribusi tertinggi (0,880), sementara **PENGEMBANGAN2** terendah (0,743), namun tetap sangat baik. Semua item tergabung dalam satu komponen utama, menunjukkan **Valid**. Lihat Tabel 8 untuk detailnya.

Tabel 8. Matriks Komponen - Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi.

Component Matrix^a

	Component
	1
PENGEMBANGAN1	.821
PENGEMBANGAN2	.743
PENGEMBANGAN3	.778
PENGEMBANGAN4	.743
PENGEMBANGAN5	.760
PENGEMBANGAN6	.822
PENGEMBANGAN7	.880

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Sumber: Hasil Riset SPSS 25

d) Evaluasi Efektivitas Program

Uji validitas pada variabel "**Evaluasi Efektivitas Program**" menunjukkan semua item memiliki nilai *loading factor* > 0,5, dengan nilai tertinggi **0,831 (EVALUASI2)** dan terendah **0,719 (EVALUASI1)**. Semua item tergabung dalam satu komponen utama, menegaskan **Valid**. Lihat Tabel 9 untuk detailnya.

Tabel 9. Matriks Komponen - Evaluasi Efektivitas Program
Component Matrix^a

	Component
	1
EVALUASI1	.719
EVALUASI2	.831
EVALUASI3	.743
EVALUASI4	.743
EVALUASI5	.822
EVALUASI6	.830
EVALUASI7	.799

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Sumber: Hasil Riset SPSS 25

e) Tantangan dalam Implementasi

Uji validitas pada variabel "**Tantangan dalam Implementasi**" menunjukkan nilai *loading factor* > 0,5, antara **0,556** dan **0,810**. Meskipun **TANTANGAN1** dan **TANTANGAN7** sedikit lebih rendah, keduanya masih **valid**. Semua item tergabung dalam satu komponen utama, menandakan validitasnya. Lihat Tabel 10 untuk detailnya.

Tabel 10. Matriks Komponen - Tantangan dalam Implementasi
Component Matrix^a

	Component
	1
TANTANGAN1	.556
TANTANGAN 2	.763
TANTANGAN 3	.810
TANTANGAN 4	.788
TANTANGAN 5	.682
TANTANGAN 6	.624
TANTANGAN 7	.600

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Sumber: Hasil Riset SPSS 25

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam instrumen penelitian ini valid dan layak digunakan dalam proses pengumpulan data karena secara statistik terbukti mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat dan konsisten.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat menghasilkan data yang konsisten dan stabil jika digunakan berulang kali dalam kondisi

yang sama. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, di mana suatu instrumen dianggap reliabel apabila nilai *alpha* > 0,7.

a) Permasalahan Korupsi di Indonesia

Hasil uji reliabilitas untuk variabel ini menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar **0,735** dengan jumlah item sebanyak 7. Nilai ini berada di atas batas minimum **0,7**, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur permasalahan korupsi di Indonesia tergolong **reliabel**. Artinya, item-item yang disusun dalam kuesioner mampu mengukur aspek yang sama secara konsisten dapat dilihat pada **Tabel 11**.

Tabel 11. *Cronbach's Alpha* - Permasalahan Korupsi di Indonesia.

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.735	7

Sumber: Hasil Riset SPSS 25

b) Peran Generasi Muda dalam Perubahan Sosial

Pada variabel ini, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar **0,836** menunjukkan bahwa tingkat konsistensi antar-item sangat baik. Dengan jumlah item yang sama, yaitu 7, instrumen ini dinyatakan sangat **reliabel**, yang berarti bahwa responden memberikan jawaban yang konsisten terhadap pernyataan yang mengukur peran generasi muda dalam perubahan sosial dapat dilihat pada **Tabel 12**.

Tabel 12. *Cronbach's Alpha* - Peran Generasi Muda dalam Perubahan Sosial.

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.836	7

Sumber: Hasil Riset SPSS 25

c) Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar **0,896**, yang tergolong sangat tinggi. Nilai ini mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek pengembangan program edukasi anti-korupsi sangat andal dan memiliki konsistensi internal yang kuat dapat dilihat pada **Tabel 13**.

Tabel 13. *Cronbach's Alpha* - Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi.

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.896	7

Sumber: Hasil Riset SPSS 25

d) Evaluasi Efektivitas Program

Nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,895 pada variabel ini juga menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik. Dengan demikian, item-item pada instrumen yang mengevaluasi efektivitas program dinilai sangat konsisten dan dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang stabil dapat dilihat pada **Tabel 14**.

Tabel 14. *Cronbach's Alpha* - Evaluasi Efektivitas Program.

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.895	7

Sumber: Hasil Riset SPSS 25

e) Tantangan dalam Implementasi

Variabel ini memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar **0,784**, yang berarti instrumen ini tergolong reliabel. Meskipun tidak setinggi dua variabel sebelumnya, nilai ini tetap menunjukkan bahwa item-item yang mengukur tantangan dalam implementasi program memiliki konsistensi yang memadai dapat dilihat pada **Tabel 15**.

Tabel 15. *Cronbach's Alpha* - Tantangan dalam Implementasi.

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
.784	7

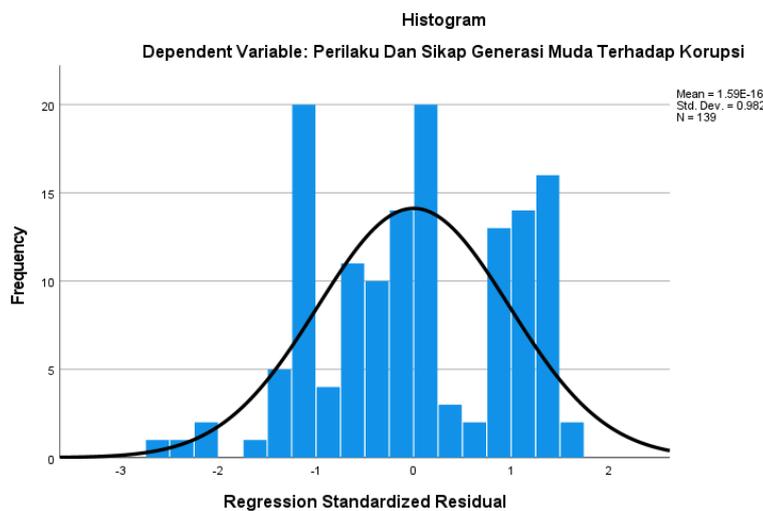
Sumber: Hasil Riset SPSS 25

Seluruh variabel di atas yang diuji, menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* di atas **0,7**, yang berarti seluruh instrumen penelitian dinyatakan **reliabel**. Hal ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari instrumen tersebut dapat dipercaya dan konsisten untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, yang penting untuk penggunaan metode statistik parametrik. Hasil analisis menunjukkan data berdistribusi normal, ditandai dengan histogram yang simetris dan membentuk kurva lonceng seperti pada **Gambar 2**.

Gambar 2. *Histogram Regression Standardized Residual*



Sumber: Hasil Riset SPSS 25

Uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi 0.000 (< 0.05), yang berarti data tidak berdistribusi normal. Ini bertentangan dengan kesimpulan sebelumnya, seperti terlihat pada Tabel 16.

Tabel 16. uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		139	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.82935187	
Most Extreme Differences	Absolute	.120	
	Positive	.073	
	Negative	-.120	
Test Statistic		.120	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		<.001	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.000	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Hasil Riset SPSS 25

Dengan demikian, berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, data sebenarnya tidak terdistribusi normal, karena nilai signifikansi < 0.05. Hal ini bertentangan dengan kesimpulan sebelumnya yang menyatakan bahwa data terdistribusi normal. Maka, perlu klarifikasi atau koreksi terhadap kesimpulan akhir dari uji normalitas tersebut.

Uji Regresi Berganda

Berikut adalah penjelasan dalam bentuk narasi dari hasil uji regresi berganda berdasarkan persamaan regresi dapat dilihat dari hasil SPSS 25 pada **Tabel 17. Uji Regresi Berganda:**

$$Y = 3.323 - 0.023X1 + 0.074X2 - 0.033X3 + 0.047X4 - 0.081X5$$

Persamaan tersebut menjelaskan hubungan antara variabel dependen (Y), yaitu perilaku dan sikap generasi muda terhadap korupsi, dengan lima variabel independen (X1 sampai X5). Interpretasi dari masing-masing koefisien adalah sebagai berikut:

- a) **Konstanta (3.323):** Jika seluruh variabel independen dianggap bernilai nol, maka nilai Y diperkirakan sebesar 3.323 satuan.
- b) **X1 (Koefisien = -0.023):** Menunjukkan pengaruh negatif terhadap Y. Setiap peningkatan satu satuan pada X1 (peran generasi muda dalam permasalahan korupsi), akan menurunkan Y sebesar 0.023 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
- c) **X2 (Koefisien = 0.074):** Menunjukkan pengaruh positif terhadap Y. Artinya, peningkatan satu satuan pada X2 (peran generasi muda dalam perubahan sosial) meningkatkan Y sebesar 0.074 satuan.
- d) **X3 (Koefisien = -0.033):** Peningkatan pada X3 (pengembangan program edukasi anti-korupsi) menurunkan Y sebesar 0.033 satuan.
- e) **X4 (Koefisien = 0.047):** Evaluasi efektivitas program memberikan pengaruh positif, dengan peningkatan satu satuan pada X4 meningkatkan Y sebesar 0.047 satuan.
- f) **X5 (Koefisien = -0.081):** Memiliki pengaruh negatif paling besar. Setiap peningkatan satu satuan pada X5 (tantangan dalam implementasi) menurunkan Y sebesar 0.081 satuan.

Secara keseluruhan, model ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki arah pengaruh yang berbeda-beda terhadap variabel dependen, baik positif maupun negatif.

Tabel 17. Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.323	1.086		3.061	.003
	Permasalahan Korupsi di Indonesia	-.023	.051	-.049	-.455	.650
	Peran Generasi Muda dalam Perubahan Sosial	.074	.038	.236	1.973	.051
	Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi	-.033	.038	-.112	-.873	.384
	Evaluasi Efektivitas Program	.047	.045	.138	1.052	.295
	Tantangan dalam Implementasi	-.081	.030	-.287	-2.708	.008

a. Dependent Variable: Perilaku Dan Sikap Generasi Muda Terhadap Korupsi

Sumber: Hasil Riset

Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut adalah hasil pengujian terhadap lima hipotesis yang dikembangkan:

- Hipotesis 1 - Permasalahan Korupsi di Indonesia:** Nilai signifikansi = 0.650 (> 0.05). H0 diterima, H1 ditolak. Artinya, X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.
- Hipotesis 2 - Peran Generasi Muda dalam Perubahan Sosial:** Nilai signifikansi = 0.510 (> 0.05). H0 diterima, H1 ditolak. X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.
- Hipotesis 3 - Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi:** Nilai signifikansi = 0.384 (> 0.05). H0 diterima, H1 ditolak. X3 juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.
- Hipotesis 4 - Evaluasi Efektivitas Program:** Nilai signifikansi = 0.295 (> 0.05). H0 diterima, H1 ditolak. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari X4 terhadap Y.
- Hipotesis 5: Tantangan dalam Implementasi:** Nilai signifikansi = 0.008 (< 0.05). H1 diterima, H0 ditolak. X5 berpengaruh signifikan terhadap Y. Ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi menjadi faktor yang benar-benar mempengaruhi perilaku generasi muda terhadap korupsi.

Uji F (Simultan) dan Koefisien Determinasi (R²)

Uji F digunakan untuk melihat apakah secara bersama-sama (simultan) kelima variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

- Sig. F = 0.086 (> 0.05) → Model regresi tidak signifikan secara simultan.
- R² = 0.069 (6,9%) → Hanya 6,9% variabel dependen dijelaskan oleh kelima variabel independen. Sebanyak 93,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini.

Hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa media digital cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran terhadap isu korupsi di kalangan generasi muda Indonesia. Sebanyak 92% responden menunjukkan pemahaman yang baik terhadap dampak negatif korupsi terhadap ekonomi dan ketimpangan sosial. Fakta ini mencerminkan bahwa paparan konten digital antikorupsi, seperti video edukatif, kampanye sosial media, dan platform pembelajaran daring, berperan besar dalam membentuk pengetahuan dasar dan moralitas publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Hoseah (2014), yang menyatakan bahwa kesadaran kolektif terhadap bahaya korupsi merupakan prasyarat utama untuk mendorong reformasi sosial yang berkelanjutan.

Namun, meskipun tingkat pemahaman cukup tinggi, media digital belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan psikologis dan sosial yang menghalangi tindakan nyata, seperti rasa takut, ketidakpercayaan, dan apatisme terhadap sistem hukum.

Walaupun media digital berhasil meningkatkan pemahaman, efektivitasnya dalam mengubah perilaku nyata terhadap korupsi masih terbatas. Uji regresi berganda menunjukkan bahwa variabel seperti pemahaman peran generasi muda dan pengembangan program edukasi digital tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap perilaku antikorupsi (nilai signifikansi $> 0,05$). Ini mengindikasikan bahwa terdapat jurang antara kesadaran kognitif dan aksi nyata. Dengan kata lain, meskipun responden memahami pentingnya melawan korupsi, mereka belum secara aktif mengambil bagian dalam tindakan antikorupsi. Hal ini menguatkan temuan Ceva & Ferretti (2021), yang menekankan bahwa pendidikan etika digital harus diiringi dengan pelibatan aktif, praktik nyata, dan ruang partisipasi publik yang lebih luas agar efektif mengubah perilaku.

Sebagian besar responden (lebih dari 73%) sepakat bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas media digital tetap terganjal oleh faktor struktural seperti keterbatasan akses teknologi, kurangnya interaktivitas konten, serta lemahnya dukungan kelembagaan. Data menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi program, seperti minimnya sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi, adalah satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku (nilai signifikansi = 0.008). Ini membuktikan bahwa strategi berbasis digital, meski inovatif, tidak akan berhasil tanpa perbaikan sistemik. Ayuningtyas et al. (2022) dan Irlandi (2025) menggarisbawahi bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada integritas dan transparansi kebijakan publik secara menyeluruh.

Meskipun lebih dari 74% responden menganggap evaluasi program sebagai komponen penting, model regresi menunjukkan bahwa pengaruhnya belum signifikan terhadap perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi yang ada masih bersifat administratif dan kurang mampu menangkap dinamika partisipasi dan perubahan sikap nyata. Oleh karena itu, media digital sebagai alat pendidikan harus dilengkapi dengan mekanisme umpan balik yang adaptif, berbasis komunitas, dan bersifat reflektif. Konten pendidikan yang hanya bersifat informatif perlu dikembangkan menjadi pengalaman pembelajaran interaktif yang melibatkan diskusi, simulasi kasus, dan platform advokasi digital. Strategi ini dinilai penting untuk membangun keberanian moral dan komitmen jangka panjang terhadap integritas (Virgy et al., 2024).

Berdasarkan analisis mendalam ini, dapat disimpulkan bahwa media digital berfungsi efektif dalam membentuk kesadaran, namun belum sepenuhnya berhasil dalam membentuk perilaku antikorupsi secara konkret. Efektivitasnya sangat tergantung pada dukungan kebijakan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, dan desain kurikulum digital yang kontekstual. Program anti-korupsi harus berorientasi pada pemberdayaan, bukan sekadar penyampaian informasi. Pemerintah perlu memperkuat literasi digital, membangun infrastruktur teknologi yang inklusif, serta mendorong sinergi dengan lembaga pendidikan dan komunitas. Jika hal ini diwujudkan, media digital bukan hanya menjadi alat bantu, melainkan instrumen transformasi sosial yang konkret dalam membentuk generasi muda yang berintegritas.

KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi berbasis digital memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda terhadap isu korupsi, sebagaimana tercermin dari persepsi positif mayoritas responden. Namun demikian, peningkatan kesadaran ini belum sepenuhnya diiringi oleh perubahan sikap dan perilaku nyata. Di antara berbagai variabel yang diteliti, hanya tantangan implementasi yang menunjukkan signifikansi statistik, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh kualitas konten,

melainkan juga oleh kesiapan sistem pendukung, seperti infrastruktur, kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor.

Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam merancang intervensi sosial berbasis teknologi. Pendidikan antikorupsi digital perlu mengintegrasikan dimensi teknis, sosial, dan kelembagaan secara menyeluruh untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Lebih lanjut, sistem pendidikan harus didesain ulang agar lebih adaptif terhadap dinamika digital, dengan alur implementasi yang efisien, kapabilitas teknis yang memadai, serta mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data yang komprehensif.

REFERENSI

- Ayuningtyas, D., Islam, H., Hasibuan, S. U., Margaretha, C., Naziyah, N., Fitrianingrum, N. M., Larasanti, A., & Ayuni, Q. (2022). Implementation of social assistance in the era of the COVID-19 pandemic: Evaluation of transparency and accountability aspects. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 51–62. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.796>
- Ceva, E., & Ferretti, M. P. (2021). Upholding public institutions in the midst of conflicts: The threat of political corruption. *Ethics & Global Politics*, 14, 163–182. <https://doi.org/10.1080/16544951.2021.1961379>
- Fernando, Z. J., Illahi, B. K., Putra, Y. S., & Gusri, I. (2023). Deep anti-corruption blueprint mining, mineral, and coal sector in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2187737>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Hoseah, E. G. (2014). Corruption as a global hindrance to promoting ethics, integrity, and sustainable development in Tanzania: The role of the anti-corruption agency. *Journal of Global Ethics*, 10(3), 384–392. <https://doi.org/10.1080/17449626.2014.973995>
- Hunter, M., Mardini, R. U., El-Seblani, A., & Elsayed, S. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability: Case study of healthcare in the Arab countries. *Global Health Action*, 13. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1704529>
- Irlandi, R. (2024). Strengthening transparency of political party financial reports to prevent illegal fundraising. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 211–224. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1218>
- Koeswayo, P. S., Handoyo, S., & Hasyir, D. A. (2024). Investigating the relationship between public governance and the corruption perception index. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2342513>
- Kohler, J. C. & Dimancesco, D. (2020). The risk of corruption in public pharmaceutical procurement: how anti-corruption, transparency and accountability measures may reduce this risk. *Global Health Action*, 13. DOI: <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694745>
- Kusworo, D. L., & Anggraini, T. (2024). Extensive interpretation of state financial losses in tin sector corruption: A comparative study of emerging economies. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 173–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1280>
- Mackey, T. K., & Cuomo, R. E. (2020). An interdisciplinary review of digital technologies to facilitate anti-corruption, transparency and accountability in medicines procurement. *Global Health Action*, 13, 1695241. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1695241>
- Nuruddin, M., Asif, N., & Barory, C. (2024). Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter dan Tantangannya. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.8>
- Rahman, H. (2022). Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 135–161.

- <https://doi.org/10.33701/jiabd.v14i1.2735>
Setiawan, Agus. (2023). Pendidikan Antikorupsi dalam Membentuk Karakter Mahasiswa: Studi Literatur dan Implikasi terhadap Kesadaran Hukum. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 1(3), 18-27. DOI: <https://doi.org/10.69914/educatus.v1i3.3>
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>
- Spyromitros, E., & Panagiotidis, M. (2022). The impact of corruption on economic growth in developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2129368. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2129368>
- Taryanto, T., & Prasajo, E. (2022). Analysis of the performance management of the Corruption Eradication Commission in optimizing the recovery of state losses. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 25–50. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.867>
- Trisiana, A., Priyanto, A., & Sutoyo. (2023). Analysis of Developing Anti-Corruption Education in Indonesia Through Media-Based Citizenship Education Learning Smart Mobile Civic. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 43(1). <https://doi.org/10.21831/cp.v43i1.60261>
- Virgy, M. A., Mustofa, M. U., & Mikail, A. (2024). One map policy as an anti-corruption endeavour in the Indonesian mining sector. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 161–172. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1312>
- Vian, T. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global Health Action*, 13. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694744>
- Wibowo, G. A., Panda, F. M., Farikiansyah, I. M., Paotonan, N., Judijanto, L., & Asparill, T. A. (2024). Digital Multiliteracy-Based Anticorruption Education Model: A Framework for Innovation in Pancasila and Civic Education. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 13(4), 746-755. DOI: <https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v13i4.83289>
- Yogi Apriansya, M. T., & Meiwanda, G. (2021). Korupsi Birokrasi Dalam Etika Administrasi Publik Dan Strategi Pencegahan Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.36917/japabis.v3i2.45>
- Zulqarnain, Z., Ikhlas, M., & Ilhami, R. (2022). Perception of college students on civic and anti-corruption education: Importance and relevance. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 123–134. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.854>